

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Evaluasi Program

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu istilah yang tidak asing dalam sebuah proses, program atau kegiatan. Evaluasi dapat diartikan sebagai pengukuran atau penilaian terhadap efektifitas strategi dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengukur atau menilai apakah tujuan sudah tercapai, apakah sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, apa yang membuat rencana atau tujuan tidak tercapai, kenapa tidak sesuai dengan rencana dan seterusnya dalam memperlakukan keberhasilan sebuah kegiatan atau program. Hasil akhir dari sebuah evaluasi adalah data dan kesimpulan mengenai keberjalanan atau keberhasilan sebuah program dan rekomendasi perbaikan ke depan.

Kata Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang menurut kamus *Oxford* berarti *to find out, decide the amount or value* suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah yang harus dilakukan secara hati hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemahaman tentang evaluasi program dapat sangat beragam sesuai dengan pengertian evaluasi yang sangat bervariasi serta pandangan para pakar evaluasi yang berbeda beda. Berikut adalah pandangan para pakar mengenai definisi evaluasi:

Pada awal perkembangan evaluasi, Scriven (1967b) dalam Mertens & Wilson, (2019) menjelaskan bahwa evaluasi sebagai sebuah metode dalam menjelaskan nilai atau manfaat pada sesuatu yang dievaluasi (proyek, program atau hal lain yang dievaluasi) harus berdasarkan pertimbangan posisi manfaat atau nilai yang dilandaskan pada dua dimensi yaitu dimensi nilai dan dimensi manfaat. Sedangkan Ralph Tyler (1949) dalam Thi Kim Anh Vo, (2018) memberikan penjelasan tentang evaluasi khususnya evaluasi pendidikan bahwa *evaluasi merupakan* perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. model Tyler didasarkan pada teori berorientasi kepada tujuan. Model tersebut memandang kurikulum sebagai sarana yang bertujuan menuju suatu objek

tujuan pendidikan. Berbeda dengan pernyataan di atas, Suchman (1967) menyatakan bahwa evaluasi akan selalu didahului dengan beberapa penilaian, baik penilaian yang tersirat maupun penilaian resmi atau tersurat kemudian memformulasikan hasil yang berkenaan dengan target dan tujuan yang akan dicapai, yang biasanya mempertimbangkan sumber pendanaan atau uang, sumber daya manusia dan daya dukung lainnya. Lain halnya dengan Worthen dan Sanders (1973) dalam Arikunto & Safruddin, (2018) yang menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan atau keberlangsungan suatu program, produksi, prosedur serta alternative strategi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Sedangkan Torchim dalam Mertens & Wilson, (2019) menyatakan bahwa:

Evaluasi merupakan profesi yang menggunakan metodologi formal untuk memberikan atau mengumpulkan data dan bukti bukti empiris yang berhubungan dengan keberjalanan organisasi (seperti program, kinerja, produk) dalam konteks pengambilan keputusan yang secara inheren bersifat politis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan yang saling bertentangan, dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Masih dalam Mertens & Wilson, (2019) Fournier menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penyelidikan terapan untuk mengumpulkan dan mensintesis data data dan bukti yang berujung pada kesimpulan tentang suatu kondisi atau keadaan, nilai, harga signifikansi atau kualitas sebuah program, produk, pemilihan dan penempatan orang, kebijakan yang berlaku, program kerja atau rencana. Kesimpulan yang diambil dari sebuah evaluasi meliputi aspek empiris (bahwa sesuatu itu terjadi) sesuai dengan target atau tidak dan normative (penilaian tentang nilai sesuatu) sesuai aturan atau tidak, hal inilah yang membedakan evaluasi dari jenis penelitian inkuiri lainnya, seperti penelitian sains dasar, epidemiologi klinis, jurnalisme investigasi, atau publik.

Dalam konteks yang lain Stufflebeam, seorang pakar evaluasi bersama D,L Coryn (2012), menyatakan bahwa proses evaluasi secara alami menyatu kedalam semua aspek kehidupan manusia dan memiliki implikasi penting dalam menjaga, meningkatkan pelayanan serta menjaga kepentingan masyarakat. Evaluasi juga merupakan proses memberikan perhatian terhadap ketepatan, efektifitas, efisiensi

penggunaan dana dan juga kemanfaatannya dalam masyarakat. Disisi lain, Stufflebeam & Zhang (2017) menyatakan bahwa Evaluasi melayani masyarakat dengan menyajikan penegasan nilai, data data kemajuan, akreditasi dan pertanggung jawaban sehingga suatu program bisa dipertanggung jawabkan untuk dilanjutkan atau dihentikan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah suatu proses mencari informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu. Evaluasi merupakan salah satu bagian dari fungsi control terhadap kegiatan, program atau kebijakan. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan menentukan kelayakan atau keberhasilan suatu produk, proses, program untuk mencapai tujuan khusus yang sudah ditentukan.

2. Pengertian Evaluasi Program

Istilah program sering difahami sebagai sebuah rencana atau rencana kegiatan. Menurut Najib (2017), Program secara umum didefinisikan sebagai kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan dalam sebuah organisasi. Sedangkan pengertian program menurut Arikunto & Safrudin, (2018) terdapat dua pengertian yaitu pengertian program secara umum dan pengertian program secara khusus. Secara umum, program dapat diartikan sebagai rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan, atau dapat dikatakan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang seperti program pelatihan bahasa Inggris disebuah lembaga pendidikan, sedangkan pengertian secara khusus merupakan rencana kegiatan yang hanya dalam waktu yang sangat singkat seperti program peringatan hari besar nasional dan sebagainya.

Berdasarkan tiga pemikiran tadi terlihat bahwa dalam menentukan program ada tiga pengertian penting yang perlu ditekankan yaitu:

1. implementasi atau realisasi suatu kebijakan,
2. bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan dan terjadi pada waktu yang relatif lama, dan
3. terjadi dalam organisasi yang mengikutsertakan sekumpulan orang.

Masih tentang program, Joan L Herman & Cs (1987) dalam Yusuf (2008) menyebutkan bahwa program adalah segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendataangkan hasil atau pengaruh. Suatu program bisa saja berbentuk nyata (*tangible*) seperti materi kurikulum atau yang sifatnya abstrak (*intangible*) seperti prosedur misalnya distribusi biaya hidup jadwal lokakarya dan lain lain.

Program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian, program dapat diartikan sebagai kegiatan yang terencana secara sistematis, berkelanjutan untuk diimplementasikan dalam kegiatan yang nyata dalam organisasi serta melibatkan banyak orang di dalamnya.

Evaluasi program adalah sebuah proses mencari informasi atau data berjalannya sebuah rencana atau kegiatan guna menentukan langkah atau kebijakan bagi para pengambil keputusan. Menurut Ralph Tyler (1982) dalam Najib (2017) menyatakan bahwa evaluasi program pendidikan adalah proses untuk mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan. Begitupun dengan Cornbach dan Stufflebeam (1982) masih dalam (Najib 2017) mengemukakan bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Meskipun evaluator menyediakan informasi, evaluator bukanlah sebagai pengambil keputusan berdasarkan informasi tentang suatu program. Begitupun menurut Munthe (2015) Evaluasi program dapat diartikan sebagai suatu proses pencarian informasi, penemuan informasi dan penetapan informasi yang dipaparkan secara sistematis tentang perencanaan, nilai, tujuan, manfaat, efektifitas dan kesesuaian sesuatu dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Stufflebeam & Zhang (2017) menyatakan bahwa:

Stufflebeam menyatakan bahwa evaluasi program merupakan penilaian dari sebuah program. Secara khusus, evaluasi program adalah proses sistematis yang menggambarkan, memperoleh, melaporkan, dan menerapkan deskripsi dan informasi yang mengukur atau menilai tentang kualitas program, efektivitas biaya, kelayakan, keamanan, legalitas, kemampuan berkelanjutan, transferabilitas, keadilan, kepentingan, dan tujuan yang diinginkan. Hasil dari proses evaluasi adalah evaluasi sebagai produk, yaitu laporan evaluasi untuk penggunaan yang diinginkan oleh pengguna yang dituju. Kesimpulan evaluasi program seharusnya didasarkan pada informasi yang relevan dan valid yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memandu evaluasi secara ringkas.

Masih menurut Stufflebeam & Zhang (2017) Pertanyaan kunci yang terjawab dengan evaluasi program adalah:

(1) Needs—What needs should the program target and meet?, (2) Solution—What is the best way to meet the assessed needs?, (3) Implementation—Is (or was) the solution effectively executed, Outcomes—Were the targeted needs met, and what are the full range of outcomes?

- 1) Kebutuhan, kebutuhan apa yang harus menjadi target dari sebuah program?
- 2) Solusi, langkah atau cara terbaik apa untuk menemukan solusi dari kebutuhan program?
- 3) Implementasi atau solusi apa yang harus segera dilaksanakan?
- 4) Hasil, apakah hasil yang ditargetkan, dan bagaimana manfaat dari hasil tersebut?

Dari beberapa definisi dan pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa evaluasi program adalah suatu proses atau kegiatan pengumpulan data dan informasi mengenai keberjalanan sebuah program untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan oleh para pengambil kebijakan.

3. Tujuan Evaluasi Program

Setiap program yang sudah atau sedang berjalan untuk mengetahui efektivitas dan ketercapaiannya diperlukan adanya evaluasi, dalam evaluasi program dapat diketahui apakah program tersebut layak untuk dilanjutkan, diperbaiki atau dihapuskan dan kemudian direkomendasikan kepada pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan. Arikunto & Safruddin (2018), menjelaskan bahwa tujuan diadakannya evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan program karena evaluator ingin mengetahui bagian mana dari komponen atau subkomponen program yang belum terlaksana. Sedangkan Alkin & Vo (2018) menyatakan bahwa berdasarkan tujuannya ada dua kategori evaluasi yaitu *formative evaluation* dan *sumatif evaluation*, menurut mereka,

Evaluasi formatif dilakukan dalam rangka memberikan informasi untuk perbaikan program, yang secara umum berarti bahwa informasi evaluasi akan memberikan indikasi bagaimana keadaan berjalannya program. Evaluasi formatif juga memberikan indikasi awal tentang apakah kemungkinan hasil program, tujuan program secara potensial dapat dicapai, evaluasi formatif umumnya dilakukan terutama untuk memberi manfaat bagi evaluator yaitu informasi sehingga mereka dapat melakukan perbaikan. Perbaikan tersebut mungkin merujuk pada modifikasi untuk memastikan bahwa rencana program asli dapat dicapai atau dapat menyarankan perubahan dalam program. Sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang ditujukan untuk mendapatkan informasi yang dirancang untuk melayani keputusan, biasanya keputusan besar. Evaluasi ini memungkinkan membuat keputusan tentang apakah program telah berhasil mencapai hasil dan mendokumentasikan status akhir program. Dengan demikian hasil evaluasi sumatif dapat mengarah pada keputusan apakah program akan dilanjutkan atau ditinggalkan, atau diimplementasikan ke program yang lain.

Stufflebeam & Coryn (2018) menyatakan bahwa ada empat kegunaan evaluasi yaitu: 1). *improvement*, 2). *accountability*, 3). *dissemination*, and 4). *enlightenment*. Bahwa evaluasi memiliki empat kegunaan yaitu untuk perbaikan, akuntabilitas, diseminasi dan memberikan kejelasan atau pencerahan. Lebih lanjut Stufflebeam menjelaskan bahwa evaluasi berdasarkan empat tujuan tadi dapat dibagi menjadi

dua yaitu evaluasi formative dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi untuk perbaikan penjaminan mutu dan memastikan produk akan sesuai tujuan, sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi untuk memberikan informasi atau akuntabilitas kepada pemegang kebijakan untuk melanjutkan atau memberhentikan program. Stufflebeam dalam (Yusuf 2008) juga menyebutkan bahwa evaluasi dibedakan menjadi *Proactive Evaluation* yaitu evaluasi yang fungsinya *formative* untuk melayani pemegang keputusan dalam perbaikan dan pengembangan program yang sedang berjalan, dan *Retroactive Evaluation* yang berfungsi sebagai evaluasi sumatif atau akhir sebagai bentuk pertanggung jawaban, keterangan dan kejelasan untuk melanjutkan atau memberhentikan program.

Menurut Roswati dalam Munthe (2015) Tujuan evaluasi program adalah sebagai berikut:

1. Menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tindak lanjut suatu program di masa depan,
2. Penundaan atau pengambilan keputusan,
3. Penggeseran tanggung jawab,
4. Pembetulan/justifikasi program,
5. Memenuhi kebutuhan akreditasi,
6. Laporan akreditasi untuk pendanaan,
7. Menjawab atas permintaan pemberi tugas, informasi yang diperlukan,
8. Membantu staf dalam mengembangkan program,
9. Mempelajari dampak/akibat yang tidak sesuai dengan rencana,
10. Mengadakan usaha perbaikan bagi program yang sedang berjalan,
11. Menilai manfaat dari program yang sedang berjalan dan
12. Memberikan masukan bagi program baru.

Hal tersebut di atas hampir sama dengan pendapat Arikunto & Safrudin (2018) bahwa setidaknya terdapat empat produk atau hasil dari sebuah evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator yang menjadi rujukan pemegang kebijakan yaitu:

1. Menghentikan program, hal tersebut dikarenakan bahwa program tidak ada atau memiliki sedikit manfaat, atau tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

2. Merevisi atau memperbaiki program, karena ada bagian bagian yang kurang sesuai dengan harapan atau tujuan atau tidak sesuai dengan SOP program. (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit)
3. Melanjutkan program. Karena hasil evaluasi menunjukkan bahwa segala sesuatunya berjalan lancar sesuai dengan SOP dan harapan atau tujuan yang sudah ditetapkan.
4. Menyebarluaskan program, hal ini dilakukan karena berdasarkan evaluasi program berhasil dengan baik sehingga sangat baik kalau disebarluaskan atau dilaksanakan ditempat dan waktu yang lain.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari evaluasi program adalah untuk perbaikan dan penjaminan terkait keberhasilan program serta memberikan informasi yang utuh terkait keberjalanan program sehingga pemangku kebijakan bisa memutuskan mengenai keberjalanan program kedepan dengan tepat atau bahkan menerapkannya ditempat lain.

4. Evaluator Program

Dalam melakukan evaluasi program, tidak setiap orang dalam organisasi atau perusahaan boleh dan bisa melakukan evaluasi. Menurut Arikunto & Safruddin (2018) untuk dapat menjadi pelaksana evaluasi atau evaluator dibutuhkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Mampu melaksanakan, persyaratan pertama yang harus oleh evaluator adalah mereka harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan evaluasi yang didukung oleh teori dan keterampilan praktek.
- b. Cermat, dapat melihat celah celah dan detail dari program serta bagian program yang akan dievaluasi.
- c. Objektif, tidak mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadi, atau yang lain, agar dapat mengumpulkan data sesuai dengan keadaanya, selanjutnya dapat mengambil kesimpulan sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan yang harus diikuti.
- d. Sabar dan tekun, agar di dalam melaksanakan tugas dimulai dari membuat rancangan kegiatan dalam bentuk menyusun proposal, menyusun instrumen,

mengumpulkan data dan menyusun laporan, tidak sembarangan, gegabah dan tergesa gesa.

- e. Hati hati dan bertanggung jawab, yaitu melakukan pekerjaan evaluasi dengan penuh tanggung jawab, namun jika masih terdapat kekeliruan yang diperbuat, berani menanggung risiko atas segala kesalahannya.

Berdasarkan beberapa kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi evaluator, bahkan setelah beberapa kriteria evaluator terpenuhi pun masih ada pertanyaan mengenai apakah seseorang diperbolehkan untuk menjadi evaluator, pertanyaan tersebut untuk mempertimbangkan dari mana asal orang yang akan menjadi evaluator, dari dalam organisasi atau dari luar. Masih menurut Arikunto & Safruddin (2018) bahwa berdasarkan asalnya, evaluator dibedakan menjadi dua, yaitu evaluator internal dan evaluator eksternal.

- a. Evaluator internal (evaluator dalam)

Yang dimaksud dengan evaluator internal atau evaluator dalam adalah petugas evaluasi program yang sekaligus merupakan salah seorang dari petugas atau anggota pelaksana program yang dievaluasi. Terdapat kelebihan dan kekurangan ketika memutuskan evaluator dari dalam.

- 1). Kelebihan:

- a) Evaluator memahami betul program yang dievaluasi sehingga kekhawatiran untuk tidak atau kurang tepatnya sasaran tidak perlu ada (evaluasi tepat sasaran).
- b) Biaya lebih murah, karena evaluator adalah orang dalam sehingga pengambilan data atau keputusan tidak terlalu memerlukan biaya yang terlalu besar.

- 2). Kekurangan:

- a) Adanya unsur subjektivitas dari evaluator, sehingga hanya berusaha menyampaikan aspek positif dari program yang dievaluasi dan menginginkan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik pula sehingga sangat dimungkinkan evaluator dari dalam akan bertindak subjektif.

- b) Tergesa gesa, karena evaluator mengetahui seluk beluk program, sehingga dikhawatirkan kurang cermat dan tergesa gesa yang pada akhirnya hasilnya tidak maksimal.

b. Evaluator eksternal (evaluator luar)

Evaluator eksternal atau evaluator luar adalah orang-orang yang tidak terkait langsung dengan kebijakan atau implementasi program. Mereka berada diluar dan diminta oleh pengambil keputusan untuk mengevaluasi keberhasilan program atau keterlaksanaan kebijakannya yang sudah diputuskan. Karena mereka berasal dari pihak luar sehingga mereka bebas dapat bertindak sesuai dengan penilaian mereka.

Adapun kelebihan dan kekurangan evaluator eksternal adalah:

1). Kelebihan

- a) Karena tidak berkepentingan atas keberhasilan program maka evaluator eksternal bisa lebih objektif selama melakukan evaluasi dan mengambil keputusan. Dengan kata lain hasil evaluasi lebih objektif dan lebih sesuai dengan keadaan dan kenyataan.
- b) Karena profesional, sehingga akan mempertahankan kredibilitas kemampuannya serius dan hati-hati.

2). Kekurangan

- a) Karena berasal dari luar dan baru mengenal kondisi lembaga, sehingga bisa saja kurang mengetahui dan memahami program atau isi kebijakan, sehingga akan berdampak pada proses evaluasi dan kesimpulan yang diambilnya.
- b) Karena pihak eksternal biasanya diambil dari profesional maka pembiayaan akan jauh lebih besar.

5. Model-Model Evaluasi Program

Dalam ilmu evaluasi program pendidikan, terdapat banyak sekali model evaluasi program yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah program. Meskipun diantara satu dan lainnya berbeda namun maksudnya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan objek yang dievaluasi, yang tujuannya adalah untuk menyediakan data bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindak lanjut sebuah program, apakah program tersebut dilanjutkan, diperbaiki atau disebarluaskan ke masyarakat.

Menurut Arikunto & Safruddin (2018) menjelaskan bahwa berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang evaluasi program yang diantaranya: Stufflebeam, Metfessel, Michael Scriven, Stake, Glaser, Kaufman dan Thomas, evaluasi program dibedakan menjadi delapan model evaluasi yaitu:

- a. *Goal Oriented Evaluation Model,*
- b. *Goal Free Evaluation Model,*
- c. *Formatif Sumatif Evaluation Model,*
- d. *Countenance Evaluation Model.*
- e. *Responsive Evaluation Model,*
- f. *CSE-UCLA Evaluation Model.*
- g. *CIPP Evaluation Model,*
- h. *Discrepancy Evaluation Model.*

a. ***Goal Oriented Evaluation Model***

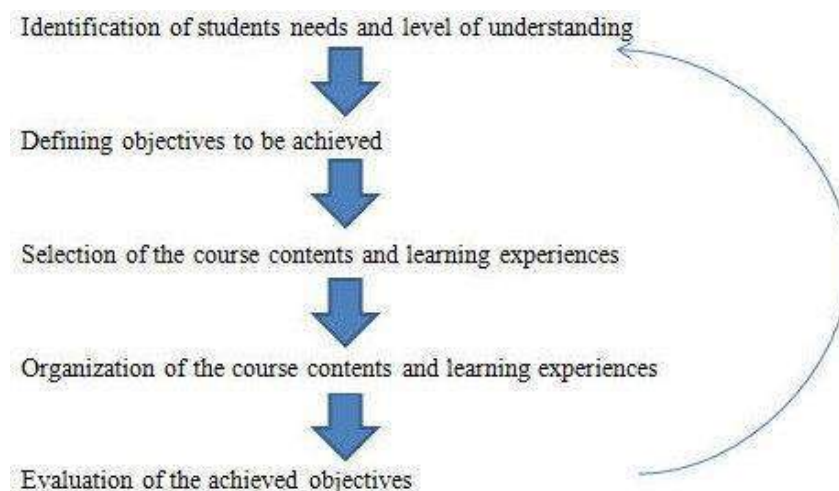
Model ini dikembangkan oleh Tyler yang merupakan model yang paling awal muncul. Tyler pertama kali memprakarsai pendekatan evaluasi goal-oriented pada tahun 1940-1950an sebagai tolok ukur terhadap evaluasi pendidikan. Model ini dikenal juga dengan nama model *Black box*, Wardani et al., (2022), menyatakan bahwa evaluasi model tyler atau Black box didasarkan pada dua hal pokok yang menjadi fokus penelitiannya yaitu:

- 1) Evaluasi yang dilakukan memiliki focus yang tujuan utamanya pada tingkah laku peserta didik diawal dan diakhir.
- 2) Evaluasi harus dilakukan dengan focus pada seluruh segmen kegiatan yaitu pada awal tingkah laku peserta didik sebelum dilaksanakannya kurikulum dan sesudah melaksanakan kurikulum (hasil).

Dalam model evaluasi ini proses tidak diperhatikan, sehingga disebut sebagai *Black-Box Model*. Dalam model ini, seorang evaluator secara terus menerus melakukan pantauan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian yang berkelanjutan ini menilai tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai peserta program serta efektifitas dari temuan yang telah dicapai oleh sebuah program.

Menurut Novalinda et al., (2020), Tyler memakai sistematika yang lebih lengkap untuk menautkan hasil yang dicapai siswa dengan yang didambakan atau yang dijadikan dengan tujuan. Tyler memformulasikan penilaian hasil belajar dari goal pembelajaran yang didasarkan pada taksonomi yang diuraikan Bloom beserta Krathwohl, yang selajutnya dinamakan orientasi Tyler. Model ini menerapkan kesenjangan antara harapan dan realita yang teramati sebagai masukan atau pertimbangan pada kekurangan dari kegiatan program, orientasi tersebut yang menitikberatkan pada goal khusus suatu kegiatan serta bagaimana hasil pencapaian program tersebut dan bagaimana langkah langkah untuk mengantisipasinya.

Model Tyler atau GOE Model, dapat diidentifikasi mempunyai tiga langkah pokok: (1) menentukan tujuan, yaitu menentukan tujuan yang sudah ditentukan sebagai bahan acuan (2) menciptakan situasi pencapaian tujuan yaitu membuat kondisi atau SOP pencapaian tujuan, dan (3) mengembangkan alat/instrument evaluasi. Ketiga aspek ini akan menjadi perhatian saat implementasi model Tyler. (Wardani et al., 2022)



Gambar 2.1 Goal Oriented Evaluation Model

Sumber: researchgate.net

Berdasarkan gambar tersebut, langkah kerja dari model evaluasi Tyler ini secara rinci adalah:

1. Mengidentifikasi kebutuhan siswa dan target pencapaian siswa.
2. Menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
3. menentukan isi dan pengalaman pembelajaran
4. mengelola isi dan pengalaman pembelajaran
5. dan mengevaluasi pencapaian hasil pembelajaran.

b. *Goal Free Evaluation Model*

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Scriven yang tidak menitik beratkan evaluasi pada tujuan akhir sebuah program. Menurut Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bekerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi kejadian kejadian atau penampilan yang terjadi baik hal hal yang positif atau yang diharapkan maupun hal hal negatif atau yang tidak diharapkan. Alasan model ini tidak memperhatikan tujuan adalah, dengan memperhatikan rincian rincian kejadian dari keberjalanan program secara efektif akan mengawal tercapainya tujuan program secara umum. Menurut Youker & Ingraham (2014) menyatakan bahwa: *Goal-free evaluation* (GFE) atau evaluasi bebas tujuan adalah evaluasi yang dilakukan dimana evaluator melakukan evaluasi tanpa pengetahuan atau referensi khusus mengenai tujuan dan sasaran yang sudah dibuat atau ditentukan sebelumnya sehingga evaluator bebas mengamati dan mengukur semua yang aktual hasil, efek, atau dampak, disengaja atau tidak disengaja, semua tanpa petunjuk tentang maksud dan tujuan program.

Evaluasi program bebas tujuan (GFE), membebaskan evaluator atau peneliti untuk melakukan evaluasi dari awal sampai akhir secara rinci tanpa harus mengetahui tujuan atau maksud dari program yang sedang berjalan peneliti tidak terbebani tangan target atau maksud dan tujuan program, hanya mengamati proses yang terjadi selama program berjalan. Untuk memudahkan, Youker memberikan masukan tahapan metodologi yang bisa dijadikan panduan melakukan evaluasi metode bebas tujuan sebagai berikut:

Tahapan metodologi evaluasi GFE, yang di ajukan oleh Youker adalah:

1. Mengidentifikasi kejadian kejadian dan dampak yang relevan dengan program untuk dijelaskan tanpa megacu tujuan atau sasaran.
2. Mengidentifikasi apa saja yang terjadi selama program berjalan tanpa mengacu sasaran atau tujuan.
3. Menentukan apakah kejadian yang terjadi secara logis dapat dikaitkan dengan program baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Menentukan atau mengelompokkan sejauh mana pengaruhnya positif, negatif, atau netral.

(Youker & Ingraham, 2014)

c. *Formatif Sumatif Evaluation Model*

Selain model yang tidak memperhatikan tujuan Scriven mengembangkan model lain, yaitu model Evaluasi *formatif-sumatif*. Model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (disebut evaluasi sumatif)

Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan selama perancangan dan pengembangan program, dengan maksud memberikan umpan balik untuk meningkatkan evaluand (obyek yang dievaluasi), dapat juga fokus pada rencana program atau desain. Pada evaluasi formatif ini pengumpulan data dan informasi diarahkan pada kekurangan atau kesalahan yang ada dalam program yang dievaluasi. Data dan informasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk perbaikan program atau produk sebagian ataupun secara keseluruhan. Evaluator hanya bertindak untuk memperoleh keputusan hasil evaluasi, sedangkan tindak lanjut hasil evaluasi dikembalikan kepada stakeholder (Mertens & Wilson, 2019).

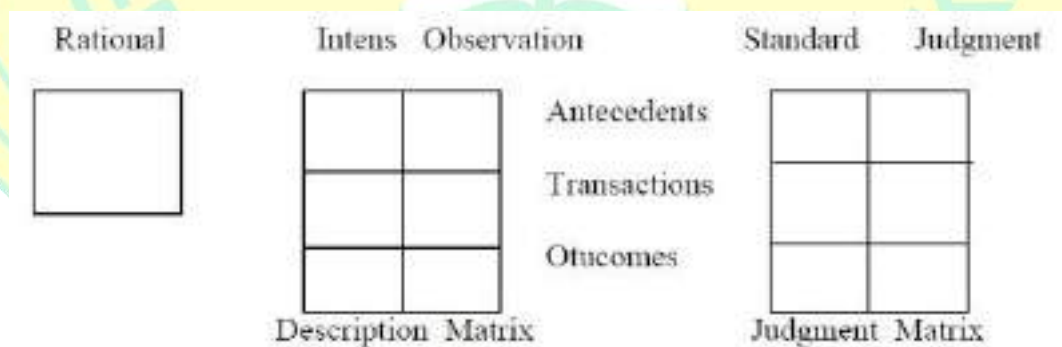
Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir, Evaluasi sumatif hanya dilakukan setelah program dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat dianalisis dalam menentukan nilai keefektifan & efisiensi kemanfaatannya. Proses mengumpulkan data dan informasi untuk membuat keputusan tentang program benar-benar bekerja sebagaimana dimaksud dalam konteks kinerja. Lebih lanjut, ini digunakan untuk menentukan apakah kemajuan

sedang dibuat dalam memperbaiki masalah kinerja yang mendorong upaya desain dan pengembangan instruksional. Tujuan utama evaluasi sumatif untuk menentukan apakah program memenuhi harapan. Evaluasi sumatif dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban atau akuntabilitas pengelolaan program dan rekomendasi tindak lanjut program kedepan. (Mertens & Wilson, 2019)

d. Countenance Evaluation Model

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Stake, bersifat naturalistik alami, menekankan pentingnya memahami program secara alami sesuai lingkungannya. Stake menciptakan sistem matriks dengan tahapan pendahuluan, transaksi, dan hasil, observasi sebagai proses pencatatan kondisi, analisis sebagai aktualisasi standar, dan keputusan dengan tindak lanjut atau rekomendasi untuk menetapkan struktur evaluasi. (Galang, 2023)

Model ini menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok yaitu (a) Deskripsi (*description*) dan (b) pertimbangan (*judgment*), serta terbagi menjadi tiga tahapan evaluasi program yaitu 1). anteseden (*antecedents/contect*) yang diartikan sebagai konteks, 2). transaksi (*transaction/process*) yang diartikan sebagai proses dan 3). keluaran (*output / outcomes*) yang mengacu pada *output* dan *outcome* yang diartikan sebagai hasil



Gambar 2.2 Evaluasi Model Countenance Stake

Pada gambar tersebut terdapat tiga hal yang digambarkan dalam bentuk diagram yang mencerminkan sasaran atau objek evaluasi. Dalam setiap program yang dievaluasi, evaluator harus mampu mengidentifikasi tiga hal, yaitu (1) anteseden - yang diartikan sebagai konteks (2) transaksi yang diartikan sebagai

proses, dan (3) Outcomes yang diartikan sebagai hasil. Selanjutnya, kedua matriks yang digambarkan sebagai deskripsi dan pertimbangan, menunjukkan Langkah langkah yang terjadi selama proses evaluasi.

Berdasarkan gambar tersebut, matriks pertama yaitu deskripsi, berkaitan dengan dua hal yang menunjukkan posisi sesuatu (yang menjadi sasaran evaluasi), yaitu apa maksud dan tujuan yang diharapkan oleh program, dan pengamatan / akibat atau apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang betul betul terjadi. Selanjutnya evaluator mengikuti matriks kedua yang menunjukkan langkah pertimbangan yang dalam langkah tersebut mengacu pada standar.

e. *Responsive Evaluation Model*

Evaluasi ini dikembangkan oleh Stake. Model *responsive evaluation* yang dikembangkan oleh Robert Stake, merupakan model yang cocok digunakan untuk mengevaluasi program yang banyak menimbulkan konflik di masyarakat. *Responsive evaluation is an approach to programme evaluation which focuses on increasing the usefulness of evaluation findings to stakeholders through sacrificing some precision in measurement (Stake, 1975) dalam (Nyathi, 2020).*

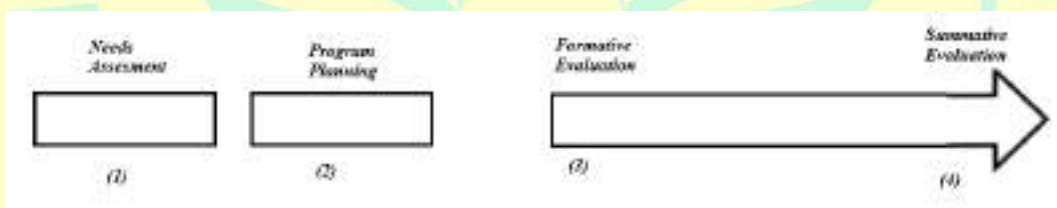
Keputusan evaluasi berorientasi kepada klien atau pengguna program sehingga mencari data berdasarkan sudut pandang orang orang yang berkaitan dengan program. Pada model evaluasi ini, evaluator berusaha mengerti urusan program melalui berbagai sudut pandangan yang berbeda. Menurut Yusuf, (2008) model evaluasi responsif berarti mencari pengertian suatu isu berdasarkan berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, yang berminat dan yang berkepentingan dengan program. Model ini membuat evaluator banyak menghabiskan waktu berbicara dengan klien, mengamati kegiatan program, mencoba menyaring hal-hal yang dipandang penting oleh klien, akibatnya evaluator harus menempatkan diri di tempat orang lain, dan tidak boleh membuat kesimpulan sendiri,tetapi lebih pada pihak memeriksa dan mengecek kembali kepastian pada sumber data primer.

Elemen penting dari model evaluasi ini adalah pengumpulan dan menyintesa data. Data utama dalam model evaluasi ini adalah hasil observasi langsung dan tidak langsung, dan bentuk laporannya adalah berupa studi kasus atau gambaran yang deskriptif yang menggambarkan secara umum kondisi program berdasarkan

responden yang berkaitan langsung. Yusuf, (2008) menyatakan bahwa kelebihan dari model evaluasi responsif adalah kepekaannya terhadap berbagai titik pandangan dan kemampuannya mengakomodasi pendapat yang ambigu dan tidak fokus. Sedangkan keterbatasannya adalah keengganannya membuat prioritas atau penyederhanaan informasi untuk pemegang keputusan dan pada akhirnya tidak mungkin menampung semua sudut pandang atau gagasan.

f. *CSE-UCLA Evaluation Model*

Evaluation Model *CSE-UCLA* terdiri dari dua singkatan, yaitu *CSE* dan *UCLA*. *CSE* merupakan singkatan dari *Center for the Study of Evaluation*, sedangkan *UCLA* merupakan singkatan dari *University of California in Los Angeles*. Ciri dari model *CSE-UCLA* adalah adanya lima tahapan evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil dan dampak. menurut Fernandes (1984) menjelaskan tentang model ini menjadi empat tahapan evaluasi, yaitu: (a) *needs assessment*; (b) *program planning*; (c) *formative evaluation*; dan (d) *summative evaluation*.



Gambar 2.3 Tahap tahap Evaluasi model CSE-UCLA

Keterangan

- 1) CSE Model : *Need Assesment*, dalam tahapan ini evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah
- 2) CSE Model: *Program Planing*, dalam tahap ini evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan perencanaan program dengan mencermati tujuan yang telah dirumuskan.
- 3) CSE Model : *Formative Evaluation*, dalam tahapan ini evaluator memusatkan pada keterlaksanaan program, dengan demikian diharapkan evaluator benar benar terlibat dengan program.

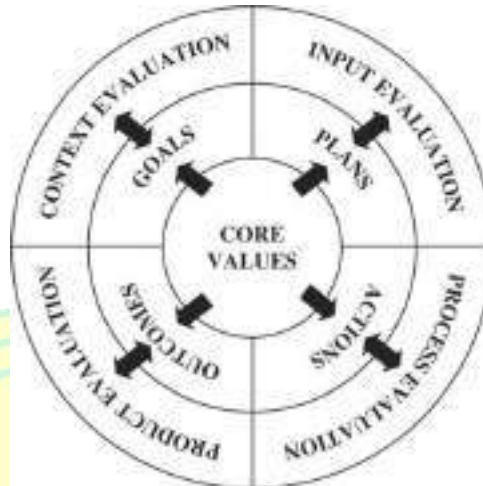
4) CSE Model: *Summative evaluation*, dalam tahapan ini evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dari program, dengan evaluasi ini diharapkan tergambar ketercapaian tujuan program.

g. CIPP Evaluation Model

Model ini merupakan model evaluasi yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan di Ohio State University, *CIPP* merupakan singkatan dari huruf awal empat buah kata yaitu: *Context evaluation* (evaluasi terhadap konteks), *Input evaluation* (Evaluasi terhadap masukan), *Process evaluation* (Evaluasi terhadap proses) dan *Product evaluation* (Evaluasi terhadap hasil).

Stufflebeam & Coryn, (2018), menyatakan bahwa Evaluasi model CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk melakukan evaluasi formatif dan sumatif, program, proyek, personel, produk, organisasi, kebijakan, dan sistem evaluasi. Pada dasarnya, model ini memberikan arahan untuk menilai konteks (dalam hal kebutuhan perusahaan akan koreksi atau perbaikan); masukan (strategi, rencana operasional, sumber daya, dan kesepakatan untuk melanjutkan intervensi yang diperlukan); proses (pelaksanaan intervensi dan biaya); dan produk (hasil positif dan negatif dari program tersebut).

Dimensi evaluasi dari model evaluasi ini terangkum dalam singkatan kata *CIPP*. Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan *CIPP* tersebut merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan, dengan kata lain model CIPP memandang bahwa program yang dievaluasi adalah sebuah sistem mulai dari konteks sampai pada produknya secara keseluruhan.



Gambar 2.4 Evaluasi Model CIPP

h. Discrepancy Evaluation Model (DEM)

Discrepancy Evaluation Model (DEM), jika diterjemahkan secara bahasa adalah ‘evaluasi model ketidaksesuaian. Namun dalam dunia evaluasi program pendidikan, model ini dikenal dengan nama Evaluasi Kesenjangan Program. Kesenjangan program adalah sebagai suatu keadaan antara yang diharapkan dalam rencana dengan yang dihasilkan dalam pelaksanaan program. Evaluasi kesenjangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standard yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan aktual dari program tersebut. Model ini dikembangkan oleh Malcolm Provus Tahun 1971, sehingga model ini disebut sebagai *Provus’s Discrepancy Model Evaluation* atau disingkat menjadi *Provus’s DEM*. (Subasno, 2018). Model evaluasi ini menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Tujuan model evaluasi ini adalah untuk mengukur besarnya kesenjangan yang ada dalam setiap komponen yang secara rinci tercantum dalam program. Dalam hal ini, evaluator mengukur adanya perbedaan (kesenjangan) antara yang seharusnya dicapai (berdasarkan tujuan program) dengan realitas hasil yang dapat dicapai.

Dalam *DEM*, Provus menyampaikan bahwa evaluasi program adalah proses: (1) mendefinisikan standar-standar dari program yang sedang berjalan sesuai dengan target dan tujuan yang sudah ditentukan; (2) menetapkan kesenjangan atau gap antara standar langkah target dan tujuan program dengan kenyataan dari program yang berjalan; dan (3) menggunakan informasi kesenjangan tersebut untuk

merubah kinerja (*performance*) atau merubah standar dari program tersebut (Ariani, 2021). Sehingga Provus menyimpulkan Ada tiga konsep kunci yang perlu diperhatikan untuk memahami DEM yaitu konsep *Standard* (S) atau standar, *Performance* (P) atau kinerja, dan *Discrepancy* (D) atau kesenjangan.

B. Konsep Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMA Terbuka)

1. Pengertian SMA Terbuka

Sejak awal abad dua puluh satu Pendidikan terbuka dan jarak jauh tumbuh dan berkembang dengan pesat bukan hanya di Indonesia tetapi hampir diseluruh dunia, baik negara berkembang maupun negara maju. Menurut Daniel (2010) dalam tema editorial jurnal *Commonwealth Open Schooling Association* (COMOSA) menyatakan bahwa, “*Open schooling is education for the 21st century. Therefore it is time for you to raise your game, to take your place in the educational ecosystem that is needed to achieve the noble goals of education for all*” (Daniel, 2010). Sekolah Terbuka merupakan pendidikan yang tepat pada abad 21, sehingga sudah saatnya setiap negara untuk mengambil peran dalam ekosistem baru pendidikan ini untuk mensukseskan program dunia yaitu pendidikan buat semua.

Di Negara negara berkembang *Oven Distance Learning* atau sekolah terbuka dan jarak jauh diharapkan menjadi solusi terhadap permasalahan peningkatan dan kemudahan akses sekolah seperti di Negara Papua New Guinea menurut Chola (2003), Bahwa di Papua New Guinea Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh telah menjadi terkenal selama dekade terakhir karena beberapa alasan permasalahan pendidikan, teknologi dan lingkungan. Kemajuan teknologi pendidikan dan telekomunikasi telah menjadi alasan utama banyak siswa memilih untuk belajar dari jarak jauh ditambah lagi dengan kendala social, budaya, ekonomi dan keuangan.

Hal itu senada dengan pernyataan Mnyanyi (2009) menyatakan bahwa sekolah terbuka dan jarak jauh di negara negara berkembang memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam peningkatan akses sekolah, hal ini perlu ditunjang dengan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan metode pendidikan dari metode tradisional ke metode yang lebih efektif dan efisien dengan penggunaan internet dan multimedia.

Siahaan & Simanjuntak WBP (2004), mengutip dari Pustekkom depdiknas 2000, menjelaskan bahwa SMA Terbuka merupakan pola pendidikan terbuka / jarak jauh pada jenjang pendidikan menengah yang kegiatan pembelajarannya dilaksanakan secara fleksibel melalui penerapan prinsip belajar mandiri. Pada dasarnya, SMA Terbuka sama dan sederajat dengan SMU regular / konvensional, perbedaannya terletak pada aspek pembelajaran SMU Terbuka yang fleksibel dan menekankan pada kemandirian siswanya dalam belajar.

Disisi lain Siahaan Sudirman (2008) menyatakan bahwa SMA Terbuka merupakan salah satu bentuk penerapan dari system atau model pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) di Indonesia. Istilah pendidikan terbuka dan jarak jauh berasal dari dua istilah yaitu sistem pendidikan terbuka dan sistem pendidikan jarak jauh. Pada tahun 1970an kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian dengan pengertian yang sama yaitu sistem pendidikan dimana siswa dan gurunya terpisah secara fisik atau geografis. Pada tahun 1980an dengan ditemukannya terobosan baru dalam bidang pembelajaran individual yang disebut sebagai fleksibel learning, istilah sistem pendidikan terbuka menjadi lebih populer dan memiliki makna tersendiri. Demikian juga dengan sistem pendidikan jarak jauh mengalami perubahan makna seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi diakhir abad ke 20. Dan pada akhirnya menjelang abad ke 21 kedua sistem pendidikan ini menjadi trend dan kecendrungan pendidikan yang banyak digunakan diberbagai negara (Paulina Panen) dalam (Belawati, 2002)

Menurut Peters (1867) dalam Andriani (2009), pendidikan jarak jauh (PJJ) merupakan produk masyarakat era industri dan sebagai suatu sistem, PJJ mempunyai banyak persamaan dengan suatu proses produksi industri (pabrik). Keduanya mempunyai kesamaan karakteristik dalam hal adanya pembagian tugas yang jelas antara pekerja dalam hal ini siswa, mekanisasi, produksi massa, standarisasi output, dan sentralisasi sistem. Karena kesesuaian sistem PJJ dengan situasi masyarakat industri inilah maka sistem ini dapat diterima oleh masyarakat dan berhasil digunakan untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia terdidik.

Dohmen 1967 dalam Belawati (2002) menyatakan bahwa sistem pendidikan jarak jauh adalah suatu bentuk pembelajaran mandiri yang terorganisir secara sistematis dimana penyajian materi pembelajaran, konseling dan penyeliaan serta

pemantauan perkembangan dan kebersihan siswa dilakukan oleh sekelompok tenaga pengajar yang memiliki tanggung jawab yang saling berbeda. Pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh dengan bantuan media.

French Law masih dalam T. Belawati (2002) menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh adalah sistem pendidikan yang tidak mempersyaratkan adanya tenaga pengajar di tempat seseorang belajar, namun dimungkinkan adanya pertemuan pertemuan antara tenaga pengajar dan siswa pada waktu waktu tertentu.

Menurut Foxs (1987) dalam T. Belawati (2002) pendidikan terbuka merupakan pola pikir dan pendekatan yang digunakan untuk menyediakan beragam pilihan untuk belajar siswa, serta memberikan sebanyak mungkin kendali bagi siswa untuk menentukan hal yang akan dipelajari dan strategi belajarnya. Karakteristik seperti inilah yang membuat pendidikan terbuka disebut sebagai *self managed learning* atau proses belajar yang dikelola sendiri (Belawati, 2002). Menurut Manpower Services Commission masih dalam T. Belawati, (2002) sistem pendidikan terbuka adalah pengaturan yang memungkinkan seseorang belajar pada waktu tempat dan kecepatan yang dipilihnya. Penekanannya adalah pada pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi semua orang tanpa harus terhambat secara geografis, ekonomis, karena pekerjaan atau karena struktur sistem pendidikan konvensional. Begitupun menurut Lewis dan Spencer (1986) yang menyatakan bahwa sistem pendidikan terbuka adalah bentuk pembelajaran yang dirancang secara fleksibel untuk memenuhi beragam kebutuhan individu siswa dan sering kali digunakan sebagai cara untuk menghilangkan hambatan belajar bagi siswa yang tidak dapat hadir dalam bentuk pembelajaran konvensional dan sangat berfokus pada siswa (*learner centered*). Dengan kata lain kalau disimpulkan sistem pendidikan terbuka ini merupakan sistem pembelajaran atau pendidikan yang memberikan tanggung jawab dan kebebasan kepada siswa untuk memilih dan menentukan kecepatan belajar, waktu belajar, tempat belajar dan proses belajar, dimana aturan dan tata tertib yang diberikan kepada siswa pendidikan terbuka adalah minimal.

Menurut Ghosh et al., (2012)

“The term open and distance learning reflects both the fact that all or most of the teaching is conducted by someone who is away from the learner, and that the mission aims to include greater dimensions of openness and

flexibility, whether in terms of access, curriculum or other elements of structure (Ghosh et al., 2012)” .

Bahwa pengertian pendidikan terbuka dan jarak jauh mengacu pada pembelajaran dimana guru dan murid terpisah, dan tujuan dari program ini adalah menyajikan dimensi keterbukaan, fleksibilitas dari sisi akses, sistem dan kurikulumnya.

Menurut Perraton (2000) Pendidikan terbuka dan jarak jauh, adalah kegiatan pendidikan terorganisir, berdasarkan pada penggunaan bahan ajar, dimana kendala pada proses pembelajaran diminimalkan baik dalam hal akses, atau waktu dan tempat, kecepatan, metode studi, atau kombinasi dari semua ini. Sedangkan menurut Bates dalam Andriani (2009), Sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) merupakan sistem yang menggabungkan konsep pendidikan terbuka dengan metode pendidikan secara jarak jauh. Konsep pendidikan terbuka (*open education atau open learning*) pada dasarnya merupakan suatu tujuan atau cita-cita kebijakan mengenai sistem pendidikan, konsep ini menekankan pentingnya keluwesan sistem, terutama dalam meniadakan kendala tempat, waktu, dan aspek yang disebabkan oleh karakteristik mahasiswa seperti misalnya keadaan ekonomi (Bates, 1995). Dengan kata lain, sistem pendidikan terbuka atau open learning adalah suatu keadaan dimana setiap individu dapat belajar tanpa restriksi apapun.

Holmberg (1986:2) juga dalam Andriani (2009) memandang PTJJ sebagai bentuk strategi pembelajaran yang terdiri dari komunikasi satu arah (presentasi materi ajar), baik dalam bentuk tercetak, terekam, maupun tersiar, dan komunikasi dua arah antara mahasiswa dan institusi penyelenggara program. Interaksi antara mahasiswa dan institusi ini (termasuk dengan tutor/dosen) sangat penting dalam proses belajar mahasiswa. Hal ini karena, menurut Holmberg, walaupun PTJJ dirancang untuk belajar mandiri tetapi tidak berarti mahasiswa ditinggalkan tanpa layanan bantuan belajar.

SMA Terbuka adalah pola pendidikan terbuka dan jarak jauh pada jenjang pendidikan menengah yang kegiatan pembelajarannya dilaksanakan secara fleksibel melalui penerapan prinsip belajar mandiri. Pada hakikatnya, SMA Terbuka sama dan sederajat dengan SMA reguler/konvensional, perbedaannya terletak pada aspek pembelajaran SMA Terbuka yang fleksibel dan kemandirian

siswanya dalam belajar Pustekkom-Depdiknas, (2000) dalam S. S. Siahaan & Simanjuntak WBP (2004). Ada lima konsep dasar yang melandasi pengertian SMA Terbuka yaitu:

- 1) Belajar pada prinsipnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi seseorang dengan sumber belajar, baik yang dirancang secara khusus maupun melalui pemanfaatan sumber belajar yang tersedia;
- 2) Kegiatan belajar dapat terjadi di mana dan kapan saja, serta tidak sepenuhnya hanya tergantung pada guru dan gedung sekolah.
- 3) Kegiatan belajar-mengajar akan mencapai tujuannya apabila berpusat pada siswa dan melibatkan siswa secara aktif.
- 4) Penggunaan media pembelajaran yang dirancang secara benar dan tepat akan dapat memberi hasil belajar yang maksimal sesuai dengan karakteristik media itu sendiri.
- 5) Peserta didik pada prinsipnya mempunyai peluang yang sama untuk berhasil dalam belajarnya apabila diberikan kesempatan dan perlakuan yang sesuai dengan karakteristiknya.

SMA Terbuka merupakan program pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) pada jenjang SMA. Program ini mulai dirintis dan dikembangkan di Indonesia tahun 2002. Perintisan program SMA Terbuka ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Tingginya angka lulusan SLTP yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah (33,1%).
- 2) Besarnya jumlah siswa SLTA yang putus sekolah (9,03%).
- 3) Keberadaan SMU konvensional masih terbatas pada tingkat kabupaten/ kota terutama di luar Jawa (faktor jarak dan geografis).
- 4) Anak-anak usia SLTA, terutama yang tinggal di daerah pedesaan (rural areas) dan daerah-daerah padat penduduk dan kumuh di perkotaan (urban areas), harus bekerja membantu orangtua mencari nafkah (faktor kemampuan finansial orangtua dan waktu).
- 5) Pengalaman menyelenggarakan pendidikan terbuka jarak jauh untuk peserta didik SLTP dan guru SD (S. S. Siahaan & Simanjuntak WBP, 2004)

Perintisan SMA Terbuka dilaksanakan di tujuh lokasi yang tersebar di enam propinsi diseluruh Indonesia. Ke tujuh lokasi perintisan tersebut adalah: (1) SMA Terbuka Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, (2) SMA Terbuka Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, (3) SMA Terbuka Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, (4) SMA Terbuka Surabaya, propinsi Jawa Timur, (5) SMA Terbuka Rupert, Kabupaten Bengkalis, Riau, (6) SMA Terbuka Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan (7) SMA Terbuka Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

Menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia (Permendikbud RI) No. 119 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh jenjang sekolah dasar dan menengah, Sekolah Terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri. Senada dengan Permendikbud di atas, pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 74, (2020) menyebutkan bahwa: Sekolah Terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari Sekolah Induk dengan penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode mandiri, terbuka dan jarak jauh.

Yang dimaksud dengan Metode belajar mandiri adalah proses belajar yang dilakukan peserta didik secara perorangan atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mendapat bantuan atau bimbingan belajar atau tutorial sesuai kebutuhan, metode belajar terbuka adalah metode dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program. Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka dan jarak jauh, sedangkan Metode pembelajaran jarak jauh adalah metode yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Juknis SMA terbuka Tahun Pelajaran 2020-2021

Dari beberapa konsepsi mengenai pengertian SMA Terbuka di atas dapat dinyatakan bahwa SMA Terbuka merupakan program pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) pada jenjang

SMA yang mengutamakan kegiatan belajar mandiri bagi peserta didiknya dengan bimbingan terbatas dari orang lain. SMA Terbuka merupakan salah satu model layanan pendidikan alternatif jalur sekolah tingkat menengah dan bukan merupakan lembaga atau UPT baru yang berdiri sendiri, melainkan menginduk pada SMA reguler yang ada. Dengan demikian, SMA reguler yang menjadi Sekolah Induk SMA Terbuka pada dasarnya menyelenggarakan pendidikan dengan dual mode system (sistem moda ganda). Artinya, Sekolah Induk SMA Terbuka sekaligus melayani dua kelompok peserta didik yang berbeda, dengan cara belajar yang berbeda. Dalam hal ini, Sekolah Induk SMA Terbuka diberi perluasan atau tambahan peran, yaitu berupa layanan pendidikan dengan sistem belajar jarak jauh yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kendala tertentu Pustekkom, (2005) dalam (S. S. Siahaan & Simanjuntak WBP, 2004)

2. Tujuan SMA Terbuka

Berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (2014), SMA Terbuka bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah. Senada dengan itu, berdasarkan konsepsi pendidikan SMA Terbuka sebagaimana yang dirumuskan Pustekkom (Pustekkom Depdiknas, 2000), tujuan penyelenggaraan SMA Terbuka Sebagai subsistem dari pendidikan SMA reguler, adalah sama dengan tujuan pendidikan menengah sebagaimana yang dirumuskan di dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/1992 yaitu:

- 1) meningkatkan pengetahuan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan
- 2) untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesenian;
- 3) meningkatkan kemampuan (keterampilan hidup) peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar.

Ada pun pemerintah provinsi Jawa Barat lewat Pergub Jabar tahun 2020 menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan SMA Terbuka di Jawa Barat adalah :

- 1) Peningkatan APK Pendidikan tingkat menengah,

- 2) Pembekalan keterampilan kerja dan pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
- 3) Revitalisasi pendidikan di SMA dalam mendukung pembangunan daerah. (Gubernur Jawa Barat, 2020)

3. Sasaran Program SMA Terbuka

Pada umumnya pendidikan terbuka dan jarak jauh merupakan sebuah alternatif pendidikan yang mulai berkembang di awal abad ke dua puluh baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Inovasi mengenai sistem pendidikan ini berawal dari konsepsi *Education for All*, sebuah gagasan besar mengenai hak manusia untuk belajar yang dicetuskan dalam konferensi dunia tahun 1990 di Jomtien Thailand yang dihadiri oleh 115 negara yang menghasilkan kesepakatan bahwa setiap negara harus membuka kesempatan seluas luasnya bagi warga negaranya untuk memperoleh pendidikan. (Belawati, 2002). Di negara-negara maju, konsep Sekolah terbuka dan jarak jauh sudah di gagas dan dimulai sejak tahun 1800-1900, dengan tujuan utama yaitu meningkatkan kuantitas dan pemerataan akses belajar, seperti yang dilakukan di Australia, Brazil, Rusia, Turki, Inggris bahkan Amerika Serikat (Qayyum & Zawacki, 2018).

Pada umumnya sasaran penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh terutama dalam hal ini SMA Terbuka menurut Rivalina, (2011), begitupun menurut Pergub Jawa Barat No. 74 2020 tentang Penyelenggaraan SMA Terbuka adalah siswa siswi dengan kategori terkendala:

- a. Kendala Waktu. Dalam kondisi tertentu para pekerja atau orang-orang yang memiliki profesi tertentu seperti para artis dan atlet tidak memiliki waktu untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah reguler sehingga sangat sulit bagi mereka untuk dapat secara teratur mengikuti kegiatan pembelajaran yang ketat (rigid) yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan reguler. Oleh karena itu, para pekerja yang memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikannya membutuhkan jenis layanan pendidikan yang memberikan fleksibilitas dalam kegiatan belajar.
- b. Kendala Geografis. Persebaran penduduk yang sangat berjauhan dengan jumlah populasi yang relatif kecil menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan

layanan pendidikan melalui lembaga pendidikan reguler yang ada hal ini terutama terjadi di pedesaan atau dipelosok pelosok Indonesia khususnya di Jawa barat. Jarak tempuh yang relatif jauh dari lokasi pemukiman masyarakat ke lokasi lembaga penyelenggara pendidikan reguler mengakibatkan terjadinya kelelahan fisik

- c. Keterbatasan Kemampuan Finansial Orang Tua (*Financial Affordance*)
Kondisi ini terjadi bukan hanya di negara negara berkembang, tetapi juga terjadi di negara negara maju, walaupun pemerintah dengan berbagai macam kebijakan berusaha membantu membiaya kegiatan pendidikan seperti yang dilakukan di Indonesia dengan adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) bantuan siswa dan mahasiswa miskin, tetapi kehidupan ekonomi keluarga mendorong anak anak usia sekolah lebih memilih bekerja dari pada sekolah.
- d. Kekurang beruntungan Fisik (*Physically Disadvantaged*).
Kondisi fisik yang kurang menguntungkan (*physically disadvantaged*) merupakan salah satu faktor atau kendala yang dihadapi sebagian anggota masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan. Dikarenakan kondisi fisik yang kurang menguntungkan atau cacat fisik (*physical disadvantaged*) mengakibatkan mobilitas terbatas termasuk untuk mengikuti kegiatan atau program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan reguler yang pada umumnya berada di daerah perkotaan
- e. Keterbatasan Transportasi Publik (*Public Transportation Constraint*)
Keberadaan lembaga pendidikan mulai dari dasar sampai pendidikan tinggi, pada umumnya jumlahnya terbatas dan berada di pusat kota baik kota kabupaten maupun kota provinsi. Salah satu sasaran didirikannya SMA Terbuka adalah siswa siswi yang terkedala masalah transportasi karena jarak antara tempat tinggal dengan sekolah relatif jauh
- f. Keterbatasan dalam Pengembangan Karier Pekerja atau Pencapaian Pangkat Puncak bagi Pegawai Negeri Sipil (*Constraint in Achieving the Highest Rank*).
Hal ini merupakan sasaran sekolah terbuka dan jarak jauh bagi orang dewasa yang karena persyaratan kepangkatan atau golongan mengharuskan menempuh pendidikan tetapi terkendala dengan waktu dan kesibukan pekerjaan.

g. Kendala Budaya.

Dibeberapa tempat di Indonesia masih kental budaya buat apa sekolah, lebih baik mengaji atau mesantren, atau lebih baik menikah untuk anak anak perempuannya., dengan adanya sekolah terbuka hal tersebut bisa ditempuh dua duanya karena sekolah terbuka sangat fleksibel dari sisi waktu dan programnya.

A. Konsep Pendidikan Berbasis *Life Skills*.

1. Pengertian Pendidikan *Life Skills*

Di Era globalisasi pendidikan menjadi sangat penting untuk mempersiapkan peserta didik memiliki keterampilan belajar berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup atau *life skills*. Dalam rangka mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, salah satu arah kebijakan kementerian pendidikan dan kebudayaan adalah peningkatan mutu dan relevansi antara pendidikan dan kebutuhan di masyarakat. Wujud relevansi pendidikan yang dimaksud adalah keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*), kebijakan tersebut terkait dan sepadan dengan: 1). Kebutuhan sumber daya manusia yang terampil, 2). Nilai, sikap, perilaku dan etos kerja masyarakat dan orientasi masa depan. (Subijanto, 2007).

Secara bahasa kata *life skills* terdiri dari dua suku kata: *Life* yang berarti hidup atau kehidupan dan *skills* yang berarti kecakapan, keahlian atau keterampilan. Secara istilah, pengertian *life skills* menurut beberapa ahli dalam Ali (2011) adalah:

1. Barrie Hopson dan Scally (1981) mengemukakan bahwa kecakapan hidup merupakan pengembangan diri untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, memiliki kemampuan untuk bersosialisasi, berkomunikasi dan berhubungan baik secara individu, kelompok maupun melalui sistem dalam menghadapi situasi tertentu.
2. Brolin (1989) menjelaskan bahwa, Kecakapan hidup merupakan interaksi berbagai macam pengetahuan, pengalaman dan kecakapan yang sangat penting pada seseorang sehingga bisa hidup mandiri sesuai dengan bakat dan minatnya.

3. WHO (1997), *life skills* adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan masalah berdasarkan bakat dan minatnya dan sikap positif dimana seseorang secara efektif dapat mandiri dan bertahan dalam tantangan hidup sehari-hari.
4. Malik Fajar (2002), *life skills* atau kecakapan hidup adalah kecakapan untuk bekerja memecahkan masalah kehidupan, selain kecakapan dalam hal akademik.
5. Menurut Francis (2007) dalam Prasetyo et al. (2013) Kecakapan hidup (*life skills*) diartikan sebagai suatu keterampilan yang dipelajari untuk melakukan sesuatu dengan baik. Kecakapan hidup merupakan kebiasaan-kebiasaan setiap individu dengan mempelajari sesuatu yang dapat menolong meningkatkan mutu kehidupannya “*skills that help an individual be successful in living a productive and satisfying life.*”
6. Depdiknas (2003), bahwa *life skills* atau kecakapan hidup merupakan keterampilan yang dimiliki seseorang berdasarkan bakat dan minatnya untuk mau dan berani menghadapi masalah hidup dan kehidupan secara wajar, tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga mampu mengatasinya (Subijanto, 2007).

Departemen Pendidikan Nasional membagi *life skills* (kecakapan hidup) menjadi empat jenis, yaitu:

1. Kecakapan personal (*personal skills*) yang mencakup kecakapan mengenal diri atau potensi yang dimiliki oleh diri sendiri (*self awareness*) dan kecakapan berpikir rasional. Merupakan kecakapan yang berkaitan dengan kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara serta kesadaran akan kelebihan dan kekurangan diri sehingga mampu untuk meningkatkan dirinya dan bermanfaat di masyarakat.
2. Kecakapan sosial (*social skills*) Merupakan kecakapan antar personal (*interpersonal skills*) yang meliputi kecakapan dalam hal berkomunikasi, berempati dan bekerja sama dengan masyarakat disekitarnya sehingga terbentuk pola hubungan yang harmonis dengan masyarakat dimanapun dia berada.

3. Kecakapan akademik (*academic skills*). Merupakan kecakapan umum yang diajarkan disekolah yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah keilmuan dan bersifat akademik, kecakapan akademik meliputi antara lain kecerdasan numerik, menulis, membaca dan lain lain
4. Kecakapan vokasional (*vocational skills*). Merupakan keterampilan itu sendiri dimana kecakapan ini seringkali disebut sebagai *life skills* itu sendiri yaitu keterampilan atau kecakapan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu seperti multi media, bertani, menjahit dan sebagainya.

Keempat kecakapan hidup di atas, sesuai dengan amanat dari undang undang harus termasuk kedalam kurikulum dan diberikan kepada peserta didik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul di Indonesia.

Dari beberapa definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan *life skills* atau pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan yang membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan, kecakapan atau *skills* agar bisa hidup mandiri bekerja dan mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan hidup sehari hari. Pendidikan *life skills* lebih mengacu pada pendidikan keterampilan yang mengarah pada bidang pekerjaan tertentu sehingga peserta didik bisa bekerja dan memperbaiki taraf hidupnya.

2. Tujuan Pendidikan *Life Skills*

Tujuan pendidikan *life skills* sangat beragam, mulai dari penanaman kecakapan dalam kehidupan keluarga sampai kecakapan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Naval Air Station Atlanta (2002), tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah,

“to promote family strength and growth through education; to teach concepts and principles relevant to family living, to explore personal attitudes and values, and help members understand and accept the attitudes and values of others; to develop interpersonal skills which contribute to family well-being; to reduce marriage and family conflict and thereby enhance service member productivity; and to encourage on-base delivery of family education program and referral as appropriate to community programs” (Naval Air Station Atlanta, 2002)

Pernyataan tersebut secara umum menyatakan bahwa pendidikan kecakapan hidup bertujuan untuk meningkatkan pengajaran, pengembangan sikap pribadi

seseorang dalam peranannya baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat sehingga bisa hidup mandiri dapat memecahkan permasalahan hidupnya sendiri.

Tim Broad-Based Education Depdiknas (2002) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah untuk:

- a. Mengembangkan dan mengaktualisasikan bakat dan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi dalam kehidupannya sehari-hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas, dan berorientasi pada tujuan pengembangan peserta didik
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah, dengan memberi peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat, sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah dan keunggulan potensi daerah atau lokal.

Wasino, 2007 membagi tujuan pendidikan *life skills* menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan kecakapan hidup adalah untuk memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya yaitu mengembangkan potensi manusiawi peserta didik untuk menghadapi tantangan kehidupan dimasa mendatang. Sedangkan tujuan khusus pendidikan kecakapan hidup adalah

1. Mengaktualisasikan potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi;
2. Merancang pendidikan agar fungsional dan tepat sasaran bagi kehidupan peserta didik dalam menghadapi kehidupannya di masa datang;
3. Memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas, dan berorientasi pada tujuan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di lingkungan sekolah, dengan memberi peluang pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat, sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. (Ali, 2011)

Selanjutnya Selamat PH masih dalam Ali 2011, menyatakan bahwa: tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah:

1. Memberdayakan kualitas asset bathiniyah, sikap dan perbuatan lahiriyah peserta didik melalui pengenalan, penghayatan dan pengamalan nilai nilai kehidupan sehari hari sehingga dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup.
2. Memberikan wawasan yang luas tentang pengembangan karir yang dimulai dengan pengenalan diri, eksplorasi karir, orientasi karir dan penyiapan karir
3. Memberikan bekal dasar dan latihan latihan yang dilakukan secara benar mengenai nilai nilai kehidupan sehari hari yang dapat mempersiapkan peserta didik kemampuan untuk menghadapi masalah dan tantangan dimasa yang akan datang.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah melalui pendekatan manajemen berbasis sekolah dengan mendorong peningkatan kemandirian sekolah, partisipasi stakeholder, dan fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah.
5. Memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan permasalahan kehidupan sehari hari.

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) adalah untuk mempersiapkan peserta didik memiliki kecakapan dalam menghadapi problema hidup baik yang bersifat internal, maupun eksternal serta memberikan kemampuan untuk dapat meningkatkan kemandirian dan kualitas hidupnya.

Pendidikan kecakapan hidup dalam batas batas tertentu telah menunjukkan perannya dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan meskipun masih ditemui ada beberapa kekurangan terutama dalam hal perancangan dan pelaksanaan program. Yoyon Suryono dalam Prasetyo et al. (2013), menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa Pendidikan kecakapan hidup di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo telah menunjukkan dapat berperan dalam mengurangi angka kemiskinan di Pedesaan tersebut sekitar 3-6 % dari keseluruhan peserta program pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan di tiga kabupaten tersebut.

3. Model Pendidikan *Life Skills*

Model kecakapan hidup yang berkembang akhir akhir ini adalah kecakapan hidup model 4H yaitu yaitu *head, hand, heart, and health* atau otak, tangan, hati, dan sehat. Model kecakapan hidup ini dikembangkan pertama kali oleh Universitas Iowa, Amerika Serikat. Pada dasarnya, model ini dikembangkan atas dasar pemahaman bahwa manusia dalam rangka mengatasi permasalahan hidup, dan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya tidak akan tercapai apabila salah satu atau semuanya di antara kemampuan berpikir, kemampuan bekerja, kemampuan mengelola jiwa/hati, dan kualitas kesehatan tidak dalam kondisi yang diharapkan.

Pertama, kepala (*head*). Kecakapan hidup yang diklasifikasikan kepada aspek ini adalah kecakapan hidup yang terkait dengan segala suatu yang dimiliki seseorang dalam bentuk pengetahuan, penalaran, dan kreativitas. Aspek ini terkategori dalam dua aspek, yaitu (1) kemampuan berpikir seperti melahirkan gagasan/ide, membuat keputusan (*decision making*), dan mencari penjelasan; serta (2) aspek pengelolaan yang mencakup pemanfaatan sumber daya untuk pencapaian tujuan.

Kedua, hati (*heart*). Kecakapan hidup yang tergolong dalam aspek ini adalah segala kemampuan yang terkait dengan memahami diri sendiri dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan (sosial). Termasuk dalam kecakapan ini adalah (1) kemampuan membangun relasi, komunikasi, kerja sama, kemitraan, yang saling menguntungkan; serta (2) kemampuan memiliki sikap yang menggambarkan kompetensi memahami diri sendiri, memiliki kebaikan hati, dan memiliki toleransi kepada orang lain.

Ketiga, tangan (*hand*). Kecakapan hidup yang masuk dalam kategori ini menunjukkan bahwa seseorang perlu memiliki kemampuan keterampilan teknis seperti keterampilan vokasional. Kompetensi dalam aspek ini adalah seseorang dapat melakukan pekerjaan (*vokasional*), dan diharapkan pekerjaan tersebut, memberikan, dan menyediakan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain.

Keempat, sehat (*health*). Kecakapan hidup terkait dengan hal ini adalah kemampuan yang terkait dengan peningkatan kualitas diri atau aktualisasi diri, dan kemampuan memelihara dan mengembangkan sikap hidup yang sehat seperti memperhatikan penampilan, menjaga kebersihan, dan berperilaku sehat.

Penerapan model *life skills 4-H* di Amerika Serikat nampaknya mengalami kesuksesan. Terdapat pandangan bahwa pencapaian kinerja individual sangat penting sekaligus harus mampu membangun kerja sama (*teamwork*). Sedangkan di Indonesia, budaya communal yaitu gotong royong cukup kuat yang mana berkonsekuensi pada kebersamaan dan saling ketergantungan yang kental sebagai hal positifnya, sekaligus menyulitkan untuk menilai kinerja individu sebagai hal negatifnya. (Prasetyo et al., 2013)

Pendidikan kecakapan hidup perlu dibentuk dan dikembangkan melalui proses pendidikan yang disebut dengan pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan kemampuan yang memungkinkan warga belajar dapat hidup mandiri.

Pada tataran pembelajaran, ciri pembelajaran kecakapan hidup adalah (1) terjadinya proses identifikasi kebutuhan belajar; (2) terjadinya proses penyadaran untuk belajar bersama; (3) terjadinya keselarasan kegiatan belajar untuk mengembangkan diri, belajar, usaha mandiri, usaha bersama; (4) terjadinya proses penguasaan kecakapan personal, sosial, vokasional, akademik, manajerial, dan kewirausahaan; (5) terjadinya proses pemberian pengalaman dalam melakukan pekerjaan dengan benar, menghasilkan produk bermutu; (6) terjadinya proses interaksi saling belajar dari ahli; (7) terjadinya proses penilaian kompetensi; dan (8) terjadinya pendampingan teknis untuk bekerja dan membentuk usaha bersama (Depdiknas, 2003). Dengan demikian program pendidikan kecakapan hidup perlu dilakukan oleh pengelola yang memiliki kemampuan yang profesional dan perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk memudahkan mencari upaya penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pengelolaan program pendidikan kecakapan hidup. (Wahyudin et al., 2017)

B. Model Evaluasi Program Yang Dipilih.

Terdapat banyak sekali model evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah program pendidikan. Walaupun terkesan banyak dan terlihat berbeda antara model evaluasi yang satu dengan yang lainnya namun kesemuanya memiliki kesamaan dalam hal tujuan, yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berhubungan dengan objek yang dievaluasi, dengan tujuan menyediakan bahan atau informasi bagi pengambil keputusan untuk menentukan tindak lanjut sebuah program.

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi model *CIPP*, pemilihan model evaluasi ini adalah karena model ini merupakan model evaluasi yang dilakukan secara komprehensif yang meliputi konteks (*Context*), Masukan (*Input*), Proses (*Process*) dan Hasil (*Product*).

Stufflebeam & Zhang (2017) menegaskan bahwa, evaluasi model *CIPP* adalah salah satu model evaluasi yang banyak digunakan dan benar benar melakukan pendekatan evaluasi secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan. Pada dasarnya evaluasi model *CIPP* langsung menilai atau mengevaluasi program melalui konteks, masukan, proses dan hasil, tidak seperti pendekatan model yang lain, *CIPP* disamping menilai hasil, juga menilai proses yang berjalan selama program berlangsung, lingkungan yang berpengaruh pada proses, tujuan sumber daya dan implementasi program.

Berikut adalah komponen komponen dalam evaluasi *CIPP* yang disampaikan oleh Stufflebeam:

1. Evaluasi Konteks (*Context evaluation*)

Menurut Stufflebeam & Zhang, (2017)” *Context evaluations assess needs, problems, assets, and opportunities, as well as relevant contextual conditions and dynamics*. Evaluasi konteks mencangkup analisis yang berkaitan dengan dasar pelaksanaan program, kebutuhan, masalah dan kondisi objektifs dan dinamika konteks sebuah program yang akan dilaksanakan. Disamping itu Stufflebeam menyatakan bahwa tujuan utama evaluasi konteks dalam model evaluasi *CIPP* adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluasi, (Rusdiana, 2017), Evaluasi konteks mencakup analisis yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Isi dari evaluasi

ini adalah tentang analisis kekuatan dan kelemahan obyek tertentu. Dalam komponen ini bisa juga dikatakan sebagai konsep, dasar hukum dan latar belakang di selenggarakannya sebuah program, karena pada evaluasi konteks menjelaskan mengenai kondisi lingkungan yang relevan, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi modal atau kekuatan dan juga peluang yang melatarbelakangi sebuah program. Evaluasi konteks bisa juga diartikan sebagai latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi yang dilakukan dalam suatu program. Selain itu, evaluasi konteks juga merupakan sebuah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang belum terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani dan tujuan dari proyek atau program yang dilakukan.

2. Evaluasi masukan (*Input Evaluation*)

Input evaluations assess a program's strategy, action plan, staffing arrangements, and budget for feasibility and potential cost-effectiveness to meet targeted needs and achieve goals. (Stufflebeam & Zhang, 2017). Menurut Stufflebeam & Zhang, evaluasi input menilai strategi program, rencana aksi, pengaturan staf, dan anggaran untuk kelayakan dan potensi efektivitas biaya untuk memenuhi target. Tujuan utama dari evaluasi input adalah untuk menentukan bagaimana memanfaatkan input atau sumber daya dalam mencapai tujuan program. Untuk maksud tersebut perlu dilakukan evaluasi, agar mendapatkan input (manusia dan fasilitas) yang mampu dan berguna dalam pelaksanaan suatu program pendidikan.

Dengan memahami kualitas input, dapat dikembangkan suatu pendekatan yang wajar dan terkontrol dalam pelaksanaan program tersebut. Kendala yang ada dapat diketahui dan diatasi sebaik mungkin. Penilaian input tersebut dapat pula dikembangkan dalam proses pembelajaran, dengan melakukan upaya pencarian informasi secara tuntas terhadap input kegiatan belajar dan pembelajaran. Input yang dinilai yaitu mencakup strategi program berupa kurikulum, sumber daya manusia berupa peserta didik, tenaga pendidik yang meliputi semua guru baik guru pamong maupun guru kunjung, tenaga kependidikan yang terdiri atas guru maupun tenaga staf yang terlibat dalam manajemen sekolah, fasilitas yang mendukung kegiatan belajar, media maupun strategi belajar serta pemanfaatan sumber belajar.

3. Evaluasi proses (*Process Evaluation*)

Menurut Stufflebeam & Zhang (2017), *Process evaluations monitor, document, assess, and report on the implementation of plans*. Evaluasi proses memantau, mendokumentasikan, menilai, dan melaporkan pelaksanaan rencana. Evaluasi seperti itu memberikan umpan balik selama implementasi program dan kemudian melaporkan sejauh mana program tersebut dilakukan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Evaluasi proses dalam model *CIPP* menunjuk pada “apa” kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” kegiatan akan selesai. Dalam model *CIPP* menurut Arikunto & Safrudin (2018) evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana atau sesuai dengan standar kegiatan yang sudah ditentukan. Pertanyaan untuk proses antara lain :

- 1) Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal?
- 2) Apakah staf yang terlibat didalam pelaksanaan program akan sanggup menanggapi kegiatan selama program berlangsung dan kemungkinan jika dilanjutkan?
- 3) Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal?
- 4) Hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan jika program dilanjutkan?.

Evaluasi proses dimaksudkan untuk memberikan umpan balik secara periodik dalam melaksanakan program. Disamping itu, dimaksudkan juga untuk mengontrol prosedur dan rencana yang telah disusun. Dengan cara demikian, dapat mendeteksi atau meramalkan segala sesuatu yang mungkin terjadi selama program itu dilaksanakan. Dan secara keseluruhan, dapat mengidentifikasi atau memantau apa yang terjadi, mengapa terjadi, komponen mana yang tidak berfungsi, aspek apa yang kurang aktif atau hambatan apa yang sering muncul dan perlu diatasi. Dalam proses pendidikan, evaluasi proses dapat dilaksanakan selama kegiatan belajar berlangsung, dengan mengidentifikasi apakah rencana yang disusun dapat dilaksanakan dengan benar? Atau kemungkinan apa saja yang didapat serta hambatan apa yang ditemukan selama pelaksanaannya?.

Komponen evaluasi proses, terdiri dari, rencana pembuatan program pembelajaran, implementasi program pembelajaran, penilaian pelaksanaan program pembelajaran, supervise dan monitoring evaluasi program.

4. Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)

Stufflebeam & Zhang (2017), menyatakan bahwa evaluasi produk merupakan evaluasi yang mengidentifikasi dan menilai, hasil yang diinginkan baik jangka pendek maupun jangka panjang apakah sudah tercapai atau belum. Evaluasi ini memberikan umpan balik selama implementasi program berjalan menuju pencapaian tujuan. Evaluasi produk yang sedang berjalan membantu mereka yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program supaya tetap fokus untuk mencapai hasil dengan efektif dan efisien. Pada akhir program, evaluasi program mengidentifikasi dan menilai keberhasilan program secara penuh dari outcome yang dihasilkan berikut antisipasinya.

Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian / keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam evaluasi produk juga mengukur dan menginterpretasi pencapaian program selama pelaksanaan program dan pada akhir program. Selain itu, evaluasi ini juga berkaitan dengan pengaruh utama, sampingan, biaya dan keunggulan program.(Arikunto & Safruddin, 2018). Pada penelitian ini evaluasi produk yang diperhatikan meliputi hasil atau produk dari program yang dijalankan berupa nilai capaian akademik peserta didik baik kognitif, afektif maupun psikomotorik yang ditunjukkan dengan nilai raport atau nilai akhir peserta didik, kompetensi *life skills* ditunjukkan dengan nilai atau sertifikat kemahiran peserta didik, keterserapan peserta didik diperguruan tinggi dan kontribusi atau peranan peserta didik dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan masyarakat sekitar yang ditunjukkan dengan jumlah alumni yang bekerja dan berwirausaha.

C. Kriteria Evaluasi

Program adalah kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan. Evaluasi program merupakan upaya untuk mengetahui keterlaksanaan dan pencapaian dari program yang sedang dilaksanakan. Untuk melakukan evaluasi terhadap sebuah program diperlukan kriteria atau tolok ukur sebagai acuan keberhasilan program yang sedang atau sudah dilaksanakan. Menurut Arikunto & Safruddin (2018), kriteria atau disebut juga sebagai takaran merupakan standar yang akan dijadikan patokan dalam menakar atau mengukur kondisi objek yang diukur. Sehingga kriteria atau takaran evaluasi adalah standar yang dijadikan acuan menilai keberhasilan atau capaian yang diperoleh dari program yang dilakukan, sebuah program dikatakan berhasil atau sukses apabila memenuhi kriteri yang sudah ditetapkan.

Masih menurut Arikunto, Kriteria atau tolok ukur evaluasi diperlukan karena beberapa hal berikut ini:

- i. Kriteria atau tolok ukur yang disusun dengan banar akan mempermudah evaluator dalam menilai atau mengukur.
- ii. Kriteria atau tolok ukur yang sudah disusun dapat digunakan untuk menjawab atau mempertanggung jawab hasil penilaian.
- iii. Kriteria atau tolok ukur digunakan untuk membatasi atau meminimalisir adanya unsur unsur subjektifitas dalam proses penilaian.
- iv. Kriteria atau tolok ukur bisa dijadikan sebagai jaminan bahwa hasil penilaian akan sama walaupun dilakukan dalam waktu nyang berbeda dan dalam kondisi fisik penilai yang berbeda.
- v. Kriteria atau tolok ukur akan menjadi panduan dan arahan bagi evaluator dalam melaksanakan penilaian, sehingga siapanpun evaluatornya akan menghasilkan penilaian yang sama.

Berdasarkan uraian diatas kriteria atau tolok ukur evaluasi sangat diperlukan dalam melakuka evaluasi sebuah program atau kebijakan, karena akan menjadi patokan atau standar dalam mengevaluasi atau menilai keberhasilan sebuah program. Adapun kriteria evaluasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi Implementasi Program SMA Terbuka Berbasis *Live Skills* di Jawa Barat

Komponen Evaluasi CIPP	Sub Komponen yang Dievaluasi	Aspek Yang Dievaluasi	Kriteria Evaluasi
1. Konteks (Context)	a. Dasar Hukum	1) Dasar perumusan program dari aspek legalitas	Terdapat dasar hukum pelaksanaan program SMA Terbuka berbasis <i>life skills</i> (berupa aturan, ketetapan, atau lainnya): UUD 1945, Permendikbud no119 tahun 2014. Pergub Jawa Barat no 74 tahun 2020.
		2) Implementasi dasar hukum	Dasar hukum yang ada dijabarkan, berupa Surat Keputusan, Petunjuk Pelaksanaan Teknis, atau dalam bentuk lainnya. Program SMA Terbuka berbasis <i>life skills</i> di SMA Terbuka Puspa Mekar
		3) Penyusunan program	Penyusunan program, sesuai dengan dasar hukum dan melibatkan pengawas Pembina serta mitra pengusaha.
		4) isi dokumen program	Isi dokumen program sesuai dengan dasar hukum dan Analisa kebutuhan.
	b. Visi dan Misi	1) Rumusan visi dan misi	Terdapat rumusan visi dan misi secara tertulis yang menjadi arah program sekolah terbuka berbasis <i>life skills</i> .
		2) Sosialisasi visi dan misi	Visi dan misi telah disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika dan stakeholder melalui berbagai media
	c. Latar Belakang	Urgensi penyusunan program	Terdapat dokumen yang melatar belakangi atau urgensi dilaksanakannya program sma terbuka berbasis <i>life skills</i> .
	d. Tujuan Program	Dasar perumusan tujuan program berdasarkan analisa kebutuhan, permasalahan dan pengembangan program	a) Terdapat rumusan tujuan program berdasarkan analisa kebutuhan.
			b) Tujuan program dijabarkan dengan jelas dan rinci sesuai dengan visi dan misi.
	e. Sasaran Program	Rumusan sasaran program	a) Terdapat rumusan sasaran program secara tertulis sesuai dengan tujuan program.

Komponen Evaluasi CIPP	Sub Komponen yang Dievaluasi	Aspek Yang Dievaluasi	Kriteria Evaluasi
			b) Sasaran program dijabarkan dengan jelas dan rinci ke dalam kegiatan program.
2. Masukan (<i>Input</i>)	a. Kurikulum	1) Kesiapan kurikulum	a) Terdapat kurikulum program yang masih valid. b) kurikulum program disusun dengan lengkap dan melibatkan ahli. c) Kurikulum sesuai dengan tujuan program pendidikan berbasis <i>life skills</i> .
		2) Struktur kurikulum	a) Kurikulum disusun sesuai dengan pedoman penyusunan kurikulum. b) Struktur kurikulum dijabarkan dengan jelas dan rinci.
		3) Silabus	a) Terdapat rencana pelajaran yang tertuang dalam silabus secara tertulis. b) Silabus sesuai dengan target kebutuhan program dan dijabarkan secara rinci dan jelas. c) Silabus dijabarkan secara rinci dan jelas.
		4) Rencana program bimbingan dan konseling	a) Terdapat rencana program bimbingan dan konseling secara tertulis. b) Program bimbingan dan konseling sesuai dengan target kebutuhan program dan dijabarkan secara rinci dan jelas. d) Program bimbingan dan konseling disosialisasikan dengan baik.
		5) Rencana Kalender pendidikan	a) terdapat kalender pendidikan secara tertulis, sesuai dengan target kebutuhan program, dijabarkan secara jelas kedalam kegiatan pembelajaran dan dapat dioperasionalkan.
		6) Rencana Jadwal pekanan	a) terdapat penyiapan jadwal pekanan pendidikan secara tertulis sesuai dengan target kebutuhan program yang dijabarkan dan diperasionalkan dalam kegiatan pembelajaran

Komponen Evaluasi CIPP	Sub Komponen yang Dievaluasi	Aspek Yang Dievaluasi	Kriteria Evaluasi
	b. Peserta Didik atau Siswa	Kesiapan peserta didik atau siswa	a) Terdapat ketentuan persyaratan siswa secara tertulis, baik administratif maupun akademis. <ol style="list-style-type: none"> (1). Usia SMA – 21 tahun Ketika mendaftar (2). Terkategori siswa terkendala b) Terdapat target pemenuhan siswa. Maksimal 20 siswa per TKB c) Target pemenuhan kebutuhan siswa terpenuhi.
	c. Bahan Ajar	Kesiapan bahan ajar	a) Terdapat kesiapan (jumlah) bahan ajar sesuai dengan rasio kebutuhan program. <ol style="list-style-type: none"> (1) Jumlah bahan ajar 1 per siswa. b) Bahan ajar dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik maupun guru. c) Bahan ajar sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. d) Bahan ajar diterima oleh siswa sesuai dengan jumlah siswa.
	d. Sarana dan Prasarana	Kesiapan sarana dan prasaran	a) Terdapat aturan standar pemenuhan sarana dan prasarana secara tertulis Permendikbud ristek no 22 tahun 2023. b) Terdapat fasilitas pendukung belajar yang memadai sesuai dengan standar pemenuhan sarana dan prasarana untuk sekolah terbuka baik ditempat kegiatan belajar (TKB) maupun disekolah induk (SI): <ol style="list-style-type: none"> (1) Tempat kegiatan belajar (TKB) <ol style="list-style-type: none"> (a) Menampung maksimal 20 siswa (b) Penerangan dan ventilasi memadai. (2) Ruang kelas <ol style="list-style-type: none"> (a) Luas 2 m² per peserta didik (b) Ventilasi dan penerangan memadai (3) Laboratorium <ol style="list-style-type: none"> (a) luas minimal ruang lab sama dengan 1,5 dari luas

Komponen Evaluasi CIPP	Sub Komponen yang Dievaluasi	Aspek Yang Dievaluasi	Kriteria Evaluasi
			<ul style="list-style-type: none"> ruang kelas (b) Dilengkapi sarana lab (4) Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> (a) luas min= luas 1 ruang kls (b) dilengkapi sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan (5) Tempat ibadah <ul style="list-style-type: none"> (a) Ruang terpisah untuk ibadah (b) luas sesuai dgn kebutuhan (6) Sarana olah raga <ul style="list-style-type: none"> (a) bentuk dan luas sesuai kebutuhan (b) dilengkapi peralatan sesuai kebutuhan (7) Aula atau ruang pertemuan <ul style="list-style-type: none"> (a) Luas sesuai kebutuhan. (b) ventilasi dan penerangan memadai (8) Sarana prasarana lainnya: <ul style="list-style-type: none"> (a) Kantin, luas sesuai kebutuhan (b) Memenuhi kriteria aman dan Sehat
	e. Tenaga Pendidik	Kesiapan tenaga pendidik baik guru bina maupun guru pamong	<ul style="list-style-type: none"> a) Terdapat ketentuan secara tertulis tentang persyaratan (administrasi dan akademis) yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik (guru bina dan guru pamong) sesuai dengan ketentuan program. <ul style="list-style-type: none"> 1) Ketentuan guru kunjung: <ul style="list-style-type: none"> (a) Guru mata Pelajaran di sekolah induk (b) Minimal D-IV atau S1 kependidikan. 2) Ketentuan guru pamong: <ul style="list-style-type: none"> (a) Guru pendamping belajar di TKB (b) Minimal SMA, (c) Lulus seleksi b) Jumlah tenaga pendidik sesuai dengan rasio kebutuhan program. (1 guru : 20 peserta didik)

Komponen Evaluasi CIPP	Sub Komponen yang Dievaluasi	Aspek Yang Dievaluasi	Kriteria Evaluasi
			c) Kualitas tenaga pendidik sudah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
	f. Tenaga Kependidikan	Kesiapan tenaga kependidikan	<p>a) Terdapat ketentuan secara tertulis tentang persyaratan (administrasi dan akademis) yang harus dipenuhi oleh tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala sekolah. <ol style="list-style-type: none"> (a) bersatatus sebagai guru (b) memiliki sertifikat pendidik (c) memiliki sertifikat kepala sekolah 2) Tenaga Administrasi <ol style="list-style-type: none"> (a) Pendidikan minimal SMA (b) Memiliki keterampilan administrasi 3) Operator <ol style="list-style-type: none"> (a) Pendidikan minimal SMA (b) Memiliki keterampilan komputer. 4) Pustakawan <ol style="list-style-type: none"> (a) Pendidikan minimal D3 5) Dan lain lain <p>b) Jumlah tenaga kependidikan sesuai dengan rasio kebutuhan program.</p> <p>c) Kualitas tenaga kependidikan sudah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.</p>
	g. Anggaran pendidikan	Kesiapan Anggaran pendidikan	<p>a) Terdapatnya rencana sumber anggaran dana program pendidikan yang memadai sesuai target kebutuhan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dana BOS 2) Dana BOS Daerah 3) Sumber lain <p>b) Terdapat ketentuan pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan dan akuntabel</p>
	h. Kerjasama /MoU dengan lembaga lain	Kesiapan kerjasama	a) Terjalannya kerjasama dengan lembaga lembaga sekitar terutama yang berkaitan dengan dunia usaha dan bisnis dalam rangka mencapai

Komponen Evaluasi CIPP	Sub Komponen yang Dievaluasi	Aspek Yang Dievaluasi	Kriteria Evaluasi
			tujuan program sekolah terbuka berbasis <i>life skills</i>
			b) Terdapatnya ketentuan dan dokumen kerjasama sesuai dengan tujuan dan kebutuhan program
3. Proses (<i>Process</i>)	a. Proses Perencanaan pembelajaran	1) Proses penyusunan Analisa Kebutuhan Sekolah terbuka berbasis <i>life skills</i>	a) Terdapat ketentuan secara tertulis tentang proses penyusunan Analisa Kebutuhan sekolah terbuka berbasis <i>life skills</i> berdasarkan program b) penyusunan analisa melibatkan seluruh stakeholder.
		2) Proses penyusunan atau revisi kurikulum	a) Terdapat ketentuan secara tertulis tentang penyusunan atau revisi kurikulum. b) Proses penyusunan atau revisi kurikulum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. c) Penyusunan atau revisi kurikulum melibatkan seluruh stake holder.
		3) Proses penyusunan rencana pembelajaran	a) Terdapat ketentuan secara tertulis tentang mekanisme penyusunan rencana pembelajaran. b) Penyusunan / revisi silabus c) Penyusunan RPP
		4) Proses penyusunan rencana penilaian	a) terdapat ketentuan tertulis tentang standar penilaian baik kognitif, psikomotorik maupu afektif b) Penyusunan rencana penilaian
		5) Proses perencanaan anggaran	a) Terdapat dokumen perencanaan anggaran sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan. b) Dokumen anggaran disusun berdasarkan kebutuhan program.
	b. Proses Pelaksanaan pembelajaran	1) Proses pelaksanaan pembelajaran	a) Terdapat ketentuan atau dokumen operasional pelaksanaan pembelajaran berdasarkan tujuan program b) Pelaksanaan pembelajaran sesuai jadwal mingguan dan harian yang telah ditetapkan.

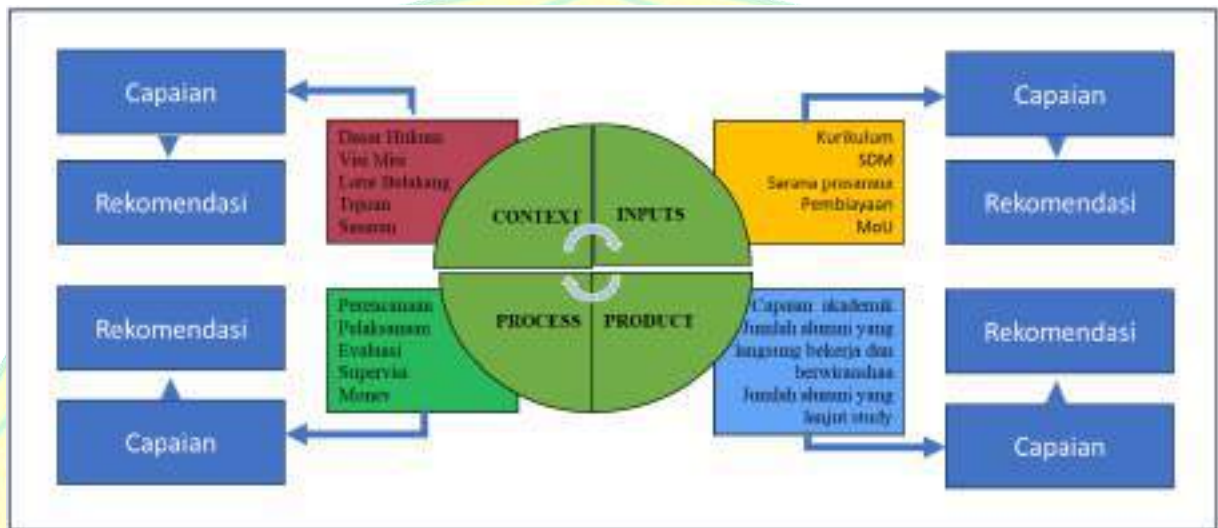
Komponen Evaluasi CIPP	Sub Komponen yang Dievaluasi	Aspek Yang Dievaluasi	Kriteria Evaluasi
			c) Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanann pembelajaran yang sudah disusun d) Melakukan penilaian sesuai dengan rencana penilaian
		2) Proses pelaksanaan pembinaan sikap dan perilaku	a) Terdapat ketentuan atau dokumen tertulis tentang pelaksanaan pembinaan sikap dan perilaku sesuai dengan tujuan program. b) Pembinaan sikap dan perilaku dilaksanakan secara sistematis dengan target sesuai dengan kebutuhan.
		3) Proses pelaksanaan pembinaan keterampilan <i>life skills</i>	a) Terdapat ketentuan atau dokumen tertulis tentang pelaksanaan pembinaan <i>life skills</i> atau kewirausahaan b) Pembinaan <i>life skills</i> dilaksanakan secara sistematis dengan target sesuai dengan kebutuhan program.
		4) Proses pelaksanaan kegiatan di luar atau ekstra kurikuler	a) Terdapat ketentuan atau dokumen tertulis tentang pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler b) Kegiatan ekstra kurikuler dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan program.
	c. Evaluasi Pembelajaran	1). Evaluasi ketercapaian kompetensi kognitif	a). Terdapat ketentuan atau dokumen tertulis tentang terlaksananya evaluasi kompotensi kognitif b). Kegiatan evaluasi kognitif dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan
		2). Evaluasi ketercapaian kompetensi psikomotorik	a). Terdapat ketentuan atau dokumen tertulis tentang terlaksananya evaluasi kompotensi kognitif b). Kegiatan evaluasi psikomotorik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan
		3). Evaluasi ketercapaian kompetensi afektif	a). Terdapat ketentuan atau dokumen tertulis tentang terlaksananya evaluasi kompotensi kognitif b). Kegiatan evaluasi afektif dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan

Komponen Evaluasi CIPP	Sub Komponen yang Dievaluasi	Aspek Yang Dievaluasi	Kriteria Evaluasi
		4). Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler	<p>a). Terdapat ketentuan atau dokumen tertulis tentang terlaksananya evaluasi kegiatan ekstrakurikuler</p> <p>b). Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan</p>
		5). Pelaksanaan anggaran	<p>a) Pelaksanaan dukungan anggaran Terdapat rumusan pelaksanaan dukungan anggaran pendidikan sesuai dengan tujuan program yang dijabarkan secara rinci dan jelas kedalam kegiatan operasional kependidikan.</p> <p>b) Pelaksanaan pengelolaan anggaran Terdapat rumusan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendidikan berdasarkan tujuan program yang dijabarkan secara rinci dan jelas kedalam kegiatan operasional pendidikan.</p>
	c. Monitoring dan supervisi	1). Pelaksanaan kegiatan monitoring	<p>a) Terdapat ketentuan kegiatan monitoring seluruh kegiatan sma terbuka berbasis <i>life skills</i> oleh seluruh perangkat sekolah</p> <p>b) Kegiatan monitoring dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan sesuai dengan tujuan program.</p>
		2). Pelaksanaan kegiatan supervisi	<p>a) Terdapat ketentuan atau dokumen tertulis tentang kegiatan supervisi kegiatan pembelajaran</p> <p>b). Kegiatan supervisi dilakukan secara berkala sesuai dengan tujuan dan perencanaan program.</p>
4. Hasil (<i>Product</i>)	a. Hasil capaian program pendidikan berbasis <i>life skills</i>	1. Hasil capaian program berupa kualitas dan kuantitas lulusan	<p>a) Terdapat dokumen tertulis tentang hasil belajar siswa sma terbuka berbasis <i>life skills</i> dalam pencapaian semua kompetensi kognitif sesuai dengan tujuan program, minimal nilai 80</p> <p>b) Proses penentuan penilaian akhir akademis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Komponen Evaluasi CIPP	Sub Komponen yang Dievaluasi	Aspek Yang Dievaluasi	Kriteria Evaluasi
		2. hasil belajar kompetensi psikomotorik	a) Terdapat dokumen tertulis tentang hasil akhir pencapaian belajar siswa dalam hal keterampilan atau <i>life skills</i> sesuai dengan tujuan program, minimal nilai 80 b) Proses penentuan penilaian akhir keterampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		3. hasil belajar kompetensi apektif	a) Terdapat dokumen tertulis tentang hasil akhir pencapaian pendidikan siswa dalam hal sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan program minimal baik dengan nilai 80. c) Proses penentuan penilaian akhir aspek sikap dan perilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	b. Peranan Alumni bagi keluarga, sekolah dan masyarakat	Peranan alumni bagi keluarga, sekolah dan masyarakat	a). Terdapatnya peranan positif alumni dalam meningkatkan taraf hidup keluarga dimasyarakat. Jumlah alumni yang langsung bekerja minimal 20%. b). Terdapatnya peranan positif alumni dimasyarakat sesuai dengan pengalaman keterampilan belajar di sekolah, jumlah alumni yang berwirausaha minimal 20%.

Kriteria - kriteria tersebut diatas sebagai ukuran dan standar yang kemudian akan dibandingkan dengan hasil evaluasi dari lapangan untuk dianalisis dan ditetapkan penilaiannya berdasarkan standar tersebut di atas.

Berdasarkan latar belakang, kajian teori dan konsep mengenai Evaluasi Implementasi Program Sekolah Berbasis *Life Skills* pada SMA Terbuka Di Jawa Barat, maka peneliti merumuskan model konsep kerangka berpikir alur penelitian yang akan ditempuh sebagai berikut:



Gambar 2.5 Model Kerangka Berfikir Evaluasi Implementasi Program Sekolah Berbasis *Life Skills* di Jawa Barat

Berdasarkan gambar tersebut, peneliti akan melakukan penelitian ini dengan mengacu pada metode evaluasi model CIPP, sehingga penelitian akan dispesifikan kedalam empat dimensi aspek meliputi konteks, input, proses dan output. Harapan dari penelitian ini adalah didapatnya data capaian capaian program berdasarkan keempat aspek tadi yang akhirnya menghasilkan rekomendasi terkait program yang sedang atau sudah dilaksanakan.